

TAJUK RENCANA

Menunggu Erick Mewujudkan Janji

SESUAI prediksi, Erick Thohir menang mutlak dalam Kongres Luar Biasa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (KLB-PSSI). Meraup 64 dari 86 voter. Pesaing beratnya, AA La Nyalla Mattaliti hanya mendapatkan sisa suaranya. Menteri BUMN yang sejak awal banyak mendapat dukungan dengan merendahkan menyebutkan: "Jabatan sebagai Ketua Umum PSSI bukanlah kemenangan pribadinya, namun kemenangan bersama..."

Erick tercatat sebagai Ketua Umum ke-20 sejak PSSI didirikan tahun 1930. Harapan besar pun terucap. Ia berjanji membangun sepakbola bersih dulu, baru prestasi. Sebuah janji yang amat sangat berat. Mengingat prestasi sepakbola negeri ini jauh dari prestasi yang dianggarkan. Terakhir prestasi membanggakan itu diraih 31 tahun silam ketika Kardono memimpin PSSI dan menyabet medali emas di SEA Games 1992.

"Tujuan utamanya membangun sepakbola bersih dan berprestasi. Waktu itu saya bilang: saya bicara, perlu nyali. Memperbaiki sepakbola Indonesia tidak perlu teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi". Inilah kalimat Erick pada media, pascaterpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 - 2027 (KR, 17/2).

Dunia olahraga bukan hal baru baginya. Pengalaman di bidang olahraga tidak hanya di sekitar sepakbola saja. Menteri kelahiran 30 Mei 1970 ini adalah pemilik Klub Basket 'Satria Muda' dan Ketua Umum PP Perbasi periode 2004 - 2006 dan Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara sejak 2006. Sebagai Anggota Komite Olahraga Internasional (IOC) mestinya paham menanganangi tatakelola organisasi olahraga. Erick adalah pengusaha dan mantan pemilik Klub Liga Itali, Inter Milan. Tentu sangat paham membawa sepak-

bola sebagai sebuah industri di tengah 'permainan' yang terjadi di dalamnya. Tentu untuk 'membersihkan permainan kotor' termasuk cengkeraman mafia, adalah tugas yang sangat tidak ringan bagi Erick. Karenanya, pada awak media pun Erick meminta dibantu dan didukung untuk tetap bisa mengawasi kinerja kepengurusan PSSI, dari luar. Erick bahkan menilai, media selama ini bisa menjadi penjaga sepakbola Indonesia agar semakin bersih dari praktik mafia pengaturan skor.

Harapan Erick adalah agar PSSI lebih dikenal dengan prestasi daripada pelbagai kontroversinya. Harapan itu termasuk segelintir janji yang harus diwujudkan. Sangat diperlukan nyali besar untuk melakukan serta mewujudkannya. Karena itulah, PSSI perlu sosok kuat dan memiliki waktu yang mencurahkan perhatian dan pemikiran untuk kemajuan sepakbola dan organisasi sepakbola di Indonesia.

Dalam jangka pendek ujian Eric Thohir adalah nyata. Pertama, bagaimana Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam ajang Piala Dunia U-20 yang akan dilaksanakan Mei 2023 mendatang. Bagi Erick ini akan menjadi ujian berat di lapangan. Apalagi menurutnya di sini ada martabat bangsa yang dipertaruhkan. Kedua, menjaga jarak sekaligus menjaga bandul keseimbangan sebagai Ketua Umum PSSI dengan hasrat politik menuju Pemilu 2024. Siapa pun tahu, nama Erick Thohir mulai dielus serta dikibarkan menjadi pemimpin negeri, dalam kancah politik pemilu mendatang.

Namun sejatinya ada tugas mendasar yang harus dilakukan saat ini: mendidik sportivitas penonton sepakbola. Sehingga penonton bola Indonesia menjadi penonton bermartabat. Menikmati kemenangan dan kekalahan sebagai hal biasa dalam sebuah pertandingan. □f

Etika Politik Pancasila

SETAHUN lagi Bangsa Indonesia akan menyelenggarakan perhelatan politik akbar. Ada pemilu presiden - wakil presiden, pemilu legislatif: DPR RI, DPRD, DPD, yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Sedangkan pilkada: gubernur, bupati, dan walikota, serentak akan dilaksanakan 27 November 2024. Pemilu merupakan proses pembangunan politik yang diharapkan dapat membawa kepada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Prof Dr M Sastrapratedja SJ (1986), pembangunan politik, akan membawa ideologi tersembunyi yang cenderung membenarkan kepentingan tertentu. Ideologi tersembunyi adalah suatu pandangan hidup yang irasional, dalam pengertian bahwa ideologi itu muncul dari gambaran-gambaran, pengalaman, konteks sosial dan pengaruh-pengaruh lain yang prarasional yang tidak disadari secara eksplisit. Ideologi dalam arti ini dilawankan dengan pandangan yang akurat tentang kenyataan, dan umumnya mendorong orang untuk mempertahankan status quo.

Guna mengatasi ideologi tersembunyi yang hanya mementingkan kepentingan tertentu, dibutuhkan kritik ideologi yang mampu membebaskan orang dari kecenderungan ideologis ini. Untuk itu dibutuhkan kerangka acuan. Kerangka acuan yang telah menjadi konsensus adalah Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan politik harus selalu dievaluasi dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi fundamental.

Nilai Kemerdekaan

Dalam Pembukaan UUD 1945, pertama, ditegaskan nilai kemerdekaan yang harus dicapai lewat pembebasan dari penjajahan. Kedua, ditekankan nilai kecerdasan kehidupan bangsa. Ketiga, ditekankan perlunya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga nilai ini sangat aktual, di samping nilai-nilai lainnya. Nilai kemerdekaan dikaitkan dengan pembebasan dari penjajahan sehingga bangsa Indonesia dapat mandiri dan memiliki identitas sendiri.

Menurut Prof Dr Franz Magnis Suseno

Niyoko

SJ (1986), dalam pembangunan politik dibutuhkan etika politik. Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam tata kehidupan berpolitik. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila adalah falsafah Bangsa Indonesia.



KR-JOKO SANTOSO

Setiap warga negara dan penyelenggara negara harus memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan. Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai susila dan tidak susila, baik dan buruk. Sifat seseorang dikatakan susila apabila ia melakukan kebajikan, sebaliknya seseorang dikatakan tidak susila apabila ia melakukan kejahatan. Tema utama etika politik adalah kekuasaan politik, dan tuntutannya yang paling mendasar adalah keadilan. Etika politik menempatkan kekuasaan ke dalam tuntutan kritis keadilan. Masalah khusus segenap kekuasaan, terutama kekuasaan politik memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan. Kekuasaan membuka kesempatan untuk mengangap sepi tuntutan

keadilan. Etika politik adalah usaha untuk menentang kesewenangan kekuasaan. Orang memiliki kekuasaan tidak berarti ia berhak memakainya menurut kemauannya sendiri. Menurut Thomas Aquinas, seorang raja yang menyalahgunakan kekuasaan yang diterimanya, telah melanggar perjanjian dengan rakyat yang mendasari haknya untuk memimpin masyarakat, maka ia bukan raja lagi melainkan tidak lebih dari seorang perampok.

Negarawan

Karenanya, negarawan harus selalu memomorsatukan kepentingan umum. Bahkan apabila mereka dipilih sebagai calon sebuah partai, begitu mereka memegang kekuasaan negara, mereka wajib untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya kesejahteraan yang memilih mereka.

Etika politik dalam arti yang sebenarnya tidak menyibukkan diri dengan sikap-sikap individual yang diharapkan dari para negarawan, melainkan dengan pengaturan atau penataan masyarakat. Etika politik mempertanyakan bagaimana masyarakat harus ditata sehingga sesuai dengan martabat manusia dan keadilan. Keadilan sosial tercapai apabila struktur-struktur kehidupan politik, sosial, ekonomis, budaya dan ideologis dalam sebuah masyarakat tersusun sedemikian rupa. Hingga keadaan dapat disebut adil, artinya, setiap orang memperoleh haknya dan diperlakukan dengan sama. □f

*) Dr Niyoko MPd, Dosen MKU UNY.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

UU PPRT untuk Keadilan yang Beradab

Nurul Lathiffah

Dalih yang diajukan adalah demi menjaga kualitas agar UU nantinya dapat menjadi payung hukum tidak hanya bagi yang bekerja di dalam negeri tetapi juga pekerja migran.

Idealnya, UU PPRT harus memberikan peluang agar PRT tetap mampu menjadi manusia seutuhnya yang memiliki kebebasan berpendapat dan memilih. PRT tidak boleh dipinggirkan dan terpinggirkan. PRT juga tidak boleh dianggap sebagai pekerja rendah yang mengakibatkan terjadinya perbudakan di era post modern. Oleh karena itu, UU PPRT yang nanti akan disahkan harus mencakup perlindungan finansial, sosial, psikis, dan juga spiritual. Dalam hal perlindungan finansial, PRT harus mendapatkan gaji sesuai dengan upah minimal yang dihitung sesuai dengan beban kerja. Dalam hal perlindungan sosial, PRT juga perlu mendapatkan hak libur, hak izin, termasuk cuti karena alasan yang jelas semisal melahirkan, sakit, dan lain sebagainya. PRT juga memiliki hak berorganisasi dan mengembangkan kapasitas diri setara dengan orang yang mempekerjakan.

Relasi

PRT juga layak mendapatkan untuk bebas dari hinaan, cacian, dan ujaran yang menyakitkan. PRT tidak boleh mendapatkan ancaman dan intimidasi dari keluarga tempat bekerja yang membuatnya menjadi korban kekerasan. Relasi antara PRT dengan pemberi kerja idealnya adalah resiprokal dan saling menguntungkan. Selanjutnya,

UNDANG-UNDANG Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) merupakan tanda bahwa negara eksis dan aktif dalam memberikan naungan dan jaminan keselamatan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Sayangnya, hingga kini RUU PPRT belum juga disahkan. Padahal tanpa regulasi, posisi PRT adalah lemah. Ironisnya, dalam keadaan lemah pun sangat rentan untuk 'dilemahkan' baik secara finansial, sosial, emosional, bahkan seksual.

Suatu pekerjaan idealnya harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau setidaknya mencukupi kebutuhan. Namun pada kenyataannya, PRT bekerja dalam iklim bekerja yang masih sangat jauh dari ideal. Bila lazimnya pegawai dan pekerja di instansi memiliki hak cuti dan hak libur, tidak demikian halnya dengan PRT. Tidak jarang PRT harus bekerja dengan meninggalkan anak-anak yang sebenarnya masih membutuhkan pengasuhan penuh.

Kabar buruknya adalah, anak-anak dari PRT rentan mengalami penelantaran pengasuhan. Tanpa pengasuhan yang optimal, anak akan rentan tumbuh dengan beragam perilaku yang menyimpang sehingga melahirkan Penyanggah Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini timbul karena PRT harus bekerja sejak pagi hingga malam, bahkan ada pula yang harus menginap tanpa adanya regulasi upah yang jelas (dan layak).

Ketidakadilan

Perlakuan yang berbeda terhadap profesi PRT hanya akan menyisakan ketidakadilan. Pada gilirannya, ketidakadilan itu tidak hanya akan berdampak pada PRT, tetapi juga anggota keluarga yang lain. Meski sudah sangat lama diwacanakan, RUU PPRT belum juga disahkan.

dalam hal perlindungan sosial, PRT juga harus mendapatkan hak beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Pokok-pokok di atas haruslah ada dalam UU PPRT yang akan disahkan.

Kita berharap bahwa DPR akan segera mengesahkan RUU PPRT yang telah dibahas secara matang dan mendalam. Penundaan pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT Mdpap menjadi celah untuk melakukan eksploitasi terhadap PRT. Dengan pengesahan babak baru keadilan sosial pun akan dimulai. Dengan peningkatan status RUU PPRT menjadi UU PPRT, semoga akan membuka jalan bagi PRT untuk lebih berdaya dalam menggapai kesejahteraan finansial, fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Kita berharap semoga RUU ini segera disahkan demi terwujudnya keadilan bagi PRT yang sering terpinggirkan. □f

*) Nurul Lathiffah MPsi, Peminat Kajian Psikologi Wanita

Pojok KR

Dosen UII dikabarkan hilang kontak
-- Jejak digital menemukan sudah di Istanbul

Muhamadiyah-Aisyiyah hidupkan spiritual tajdid terus-menerus
-- Tajdid harus dinamis, sesuai zaman

Banjir melanda sebagian wilayah Klaten
-- Air Bengawan Solo, mengalir sam-pai jauh....

Beraba

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com ☎ 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Sampah Teronggok di Pinggir Jalan Magelang

SLEMAN, dikenal sebagai salah satu kabupaten di DIY yang penuh prestasi. Namun soal sampah, kami melihat ada penanganan yang kurang baik. Sehingga tidak tahu bagaimana harus menyampaikannya. Karena di media ini sudah berkali-kali persoalan mengenai sampah ditulis bahkan termasuk di rubrik 'Pikiran Pembaca' SKH Kedaulatan Rakyat. Ini adalah masukan yang harus mendapat perhatian.

Soal sampah bukan sekadar TPS, penanganan sampah rumah tangga atau kehadiran bank sampah. Namun sampah di jalanan di kawasan Sleman yang luas, harus juga diperhatikan. Masih ada 'wajah sampah' jelas dari luar dan sejatinya memalukan. Seperti tampak di Jl Magelang KM 12, di depan sebuah bangunan rumah yang ter-

tulis 'dijual'.

Di depan rumah tersebut dan sekitarnya, sampah jalanan dari dedaunan dan ranting kering menumpuk. Padahal kawasan ini tidak jauh dari ibukota kabupaten Sleman, tempat kantor kabupaten. Dan kondisi ini tidak sesuai dengan slogan 'Sleman Sembaga' yang di antaranya terdapat kata 'bersih dan berbudaya'.

Mangga Ibu Bupati, sebagai pemimpin Sleman, sebagai ibu, gerakan petugas kebersihan, dinas kebersihan untuk membuat wajah Sleman elok. Bersihkan sampah-sampah yang berserakan di jalanan. Ini bukan satu-satunya. Malu lah, jika di Sleman sampah berserak tidak karuan. Banyak lho serakan sampahnya. □f

*) Edi MA, Gebang Wedomartani Sleman

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Musbahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafiis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifulah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiati.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd, Wakil: Asrul Sani.
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragi Dedy TP